

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kedudukan Peraturan Menteri.....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Perusahaan Bisnis Negara	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (<i>United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights</i>)	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sifat Penelitian	34
C. Data Penelitian	35

D. Cara Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Hasil Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kedudukan dan Perkembangan Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) dalam Sistem Hukum Indonesia.....	38
1. Kedudukan UNGPs pada Praktik Bisnis dan Hukum Internasional	38
2. Perkembangan Implementasi Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia sesuai dengan Resolusi UNGPs	47
B. Kebijakan dan Implementasi Penyederhanaan Peraturan Menteri BUMN terhadap Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) .	57
1. Praktik Penyederhanaan Pengaturan BUMN pada Tingkat Peraturan Menteri	57
2. Kesesuaian Kebijakan Deregulasi Sektor BUMN pada Tingkat Peraturan Menteri dengan Perpres 60/2023 sebagai Wujud Komitmen Implementasi Prinsip Bisnis dan HAM (UNGPs) di Indonesia.....	65
3. Langkah Optimalisasi Perpres 60/2023 terhadap Pengaturan Sektor BUMN.....	87
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98